



Peningkatan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dalam Penatausahaan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Arifuddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: arifuddin.mannan@gmail.com

Kartini, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: hanafikartini@fe.unhas.ac.id

Rizky Utami[✉], Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: rizkyutami@unhas.ac.id

Gagaring Pagalung, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: gpagalung@yahoo.com

Haniek Khoirunnissa Baja, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail:

Muhammad Ashari, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: ashari.ec02@gmail.com

Abdul Rahman, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: abdurrahmansalamak@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas Bendahara Pengeluaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menatausahakan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjalankan perannya secara profesional, bertanggung jawab dan auditable. Peningkatan kapabilitas yang diperoleh oleh para Bendahara Pengeluaran diharapkan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta diharapkan penatausahaan dan pelaporan yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara ceramah dan materi tutorial yang dilaksanakan di Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil pelaksanaan kegiatan memperlihatkan bahwa para bendahara penerima SKPD berhasil melaksanakan penatausahaan bendahara penerimaan dengan baik sehingga dapat menunjang tugas dan wewenang mereka sebagai bendahara pengeluaran.

Kata Kunci: *Penatausahaan, pendapatan daerah, bendahara pengeluaran.*

Abstract

This service activity is carried out in order to improve the capability of the Expenditure Treasurer – Regional Apparatus Work Unit in administering regional financial management so that it can carry out its role professionally, responsibly and auditably. The increased capacity acquired by the expenditure funds is expected to have an impact on the financial

management of the district of Pangkep so that it can run well. In accordance with the provisions of the Law, it is expected that the entrepreneurship and reporting carried out is in line with the principles of the Government Accounting Standards (GAS). The method of implementation of activities is carried out by means of lectures and tutorial materials that are implemented in Kabupaten Pangkajene and Islands Regional Government Offices. The results of the implementation of the activities show that the SKPD recipient treasuries managed to carry out the enterprise of the receipt treasury well so that they can support their duties and authority as expenditure treasures

Keywords: *Administration, regional revenue, expenditure treasures.*

Copyright (c) 2024 **Rizky Utami**

✉ Corresponding author :

Email Address : rizkyutami@unhas.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kab. Pangkep) menjadi salah satu kabupaten yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dan telah meraih sembilan kali berturut-turut opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Meski demikian, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, guna memperbiki kualitas laporan keuangan agar lebih baik lagi maka diperlukan pengkajian lebih dalam lagi.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami perkembangan signifikan dalam penatausahaan belanja daerah, dengan fokus pada peningkatan kapabilitas bendahara pengeluaran. Langkah-langkah progresif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam era tuntutan publik yang semakin meningkat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengambil langkah strategis untuk memperbarui sistem penatausahaan belanja daerah.

Fokus utama pada peningkatan akuntabilitas bendahara pengeluaran menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, efisien, dan akuntabel. Kelemahannya, kas di bendahara pengeluaran tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan persediaan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai tidak tertib administrasi, penyajian investasi jangka panjang, investasi non permanen pinjaman modal yang disajikan tidak berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan beberapa akun dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dan BPK tidak dapat melakukan prosedur audit untuk meyakini kewajaran saldo akun tersebut dalam laporan keuangan.

Terkait dengan temuan tersebut dan sejalan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan, maka pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentunya akan melakukan berbagai upaya. Beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya adalah, menyusun berbagai kebijakan terkait pengelolaan keuangan, melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, serta melakukan pengadaan

software yang dapat membantu efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kewenangan dan juga tanggungjawab sepenuhnya kepada masing-masing daerah untuk mengelola, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggarannya. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang milik negara/daerah. Berdasarkan dari segi ruang lingkup, tugas dan wewenang Bendahara, maka dikenal dua jenis Bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Memperhatikan peraturan tersebut, perlu ditegaskan bahwa seorang Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat teknis karena berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran daerah, serta selalu menjadi perhatian khusus oleh aparat pengawas internal maupun eksternal pemerintah daerah.

Bendahara pengeluaran mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Bendahara pengeluaran harus membukukan dan mencatat setiap transaksi pengeluaran dan penarikan dari bank dalam buku Pengeluaran Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran menerima dokumen pengeluaran seperti surat perintah pengeluaran (SPP) dari unit-unit kerja yang membutuhkan dana, menyusun jurnal pengeluaran berdasarkan dokumen yang diterima, mencatat setiap transaksi pengeluaran ke dalam sistem keuangan pemerintah daerah, melaksanakan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak menerima dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang diotorisasi, menyiapkan laporan keuangan berkaitan dengan pengeluaran, dan menjaga dokumen-dokumen pengeluaran dengan baik untuk keperluan audit dan verifikasi.

Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan pemerintahan pusat lebih berada di Pemerintah Daerah. Akibatnya adalah bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mampu melakukan penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang dimiliki. Potensi pendapatan yang tersedia di level pemerintah daerah perlu terus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal (Sabir dkk, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamatkan diberlakukannya akuntansi berbasis akrual, bahwa seluruh entitas wajib mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2015. Ada perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual membawa banyak dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, Bendahara Pengeluaran juga harus memahami dengan baik perubahan dari basis kas ke basis akrual ini.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pertama, dibutuhkan adanya komitmen pihak-pihak yang saling terkait seperti kepala daerah, DPRD, kepala SKPD, dan seluruh pegawai. Kedua, meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Keempat, meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya. Kelima, tidak terdapat temuan yang berulang.

Sehingga tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapabilitas Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menatausahakan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjalankan perannya secara profesional, akuntabel, dan auditable. Melalui peningkatan kapabilitas para Bendahara Pengeluaran, diharapkan pengelolaan keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam penatausahaan dan pelaporan sejalan dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada tanggal 24 Agustus 2023. Khalayak sasaran adalah Seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara, disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan bertanggung jawab atas seluruh uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan para bendahara pengeluaran dengan menggunakan metode cerama dan tutorial. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah pertama-tama peserta akan diberikan pemahaman materi tentang gambaran umum pengelolaan keuangan daerah, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama, dan diberikan materi dalam bentuk tutorial.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari para bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saat pelaksanaannya, para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan karena hal ini menyangkut tugas dan wewenang mereka selaku bendahara pengeluaran dari beberapa wilayah kecamatan. Hal ini dapat meningkatkan kapabilitas mereka sebagai Bendahara Pengeluaran.

Metode evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan dari kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa kasus penatausahaan pengeluaran dan meminta kepada peserta untuk memberikan pemecahan masalah atas kasus tersebut dengan berdasarkan rujukan yang sudah dijelaskan dalam pelatihan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian untuk meningkatkan kapabilitas para Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Pangkep merupakan langkah yang strategis dalam memperkuat tata kelola

keuangan di tingkat daerah. Kegiatan ini diikuti oleh 30 Bendahara Pengeluaran dari setiap SKPD yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Proses pelaksanaan pengabdian tersebut, dilakukan dengan serangkaian pelatihan dan pembekalan terkait manajemen keuangan publik, termasuk pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dengan akuntabilitas yang tinggi serta memastikan bahwa setiap tindakan keuangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengabdian ini juga melakukan pendampingan langsung dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan yang mengacu pada prinsip dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan para Bendahara Pengeluaran mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal, menghindari potensi penyimpangan atau kesalahan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Pangkep. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif bagi kemajuan daerah tersebut.

Tahap pertama, tim PPM memberikan ceramah kepada para Bendahara Pengeluaran terkait gambaran umum pengelolaan pengeluaran pada pemerintah daerah. Pada kesempatan ini, peserta yang ada dalam pengabdian ini mendapatkan materi dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan konsep serta aspek-aspek teknis maupun yuridis berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, menjadi syarat yang diperlukan sekaligus sebagai syarat yang mencukupi agar aparatur pemerintah dapat menjalankan fungsi dan peran yang baru tersebut dengan sebaik-baiknya. Materi ini tidak hanya menjadi syarat yang diperlukan, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh bagi para bendahara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Pangkep.



Gambar 1. Penerimaan Tim Pengabdian UNHAS oleh Tim Mitra Pengabdian

Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan tutorial, pelaksanaan kegiatan tutorial bertujuan agar para Bendahara Pengeluaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih mengerti dan mendalami bagaimana pengelolaan pengeluaran pemmemrintah daerah yang sesuai dengan yang terdapat di dalam peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Turorial dalam kesempatan ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan apa saja yang terdapat dalam melakukan penatausahaan pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urutan penyampaian materi tutorial serta latihan kasus yang diberikan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Materi Tutorial

No.	Materi Bahasan	Alokasi Waktu (sesi)
1	Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD	3
2	Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas PPKD	1
3	Laporan Pertanggungjawaban BUD	1
4	Verifikasi Pengeluaran - Latihan	1

**Gambar 2.** Kegiatan Ceramah dan Tutorial oleh Tim Pengabdian UNHAS

Materi pertama terkait sistem dan prosedur pengeluaran kas SKPD membahas mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas SKPD menjadi fokus penting untuk memperkuat tata kelola keuangan di tingkat daerah. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengeluaran kas, mulai dari permintaan anggaran hingga pelaporan akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh SKPD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang sistem dan prosedur ini, diharapkan para Bendahara Pengeluaran dapat menghindari potensi kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengeluaran kas.

Selain itu, materi juga mencakup penekanan pada pentingnya pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas SKPD. Para peserta diberikan pemahaman tentang bagaimana mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam setiap tahapan proses pengeluaran kas. Pengendalian internal yang efektif merupakan kunci untuk meminimalkan risiko penyelewengan atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, para Bendahara Pengeluaran diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan baik demi terjaminnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas SKPD.

Selanjutnya, dalam pembahasan materi ini juga ditekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung efisiensi dan efektivitas sistem pengeluaran kas SKPD. Para peserta diberikan pemahaman tentang berbagai aplikasi atau sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugas administratif terkait dengan pengeluaran kas, mulai dari pembuatan dokumen transaksi hingga pelaporan keuangan. Penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu mengurangi potensi kesalahan manusia serta mempercepat proses pengeluaran kas secara keseluruhan. Dengan demikian, SKPD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Pangkep.

Materi kedua dilanjutkan dengan pokok bahasan sistem dan prosedur pengeluaran kas PPKD, yang mana pada program pengabdian ini materi mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas pada PPKD (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota) menjadi esensial dalam memperkuat tata kelola keuangan di level pemerintahan yang lebih tinggi. Peserta diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengeluaran kas PPKD, termasuk prosedur permintaan anggaran, pencairan dana, pelaksanaan pembayaran, hingga pelaporan akhir. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPKD dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta transparan dan akuntabel.

Selain itu, materi juga mencakup poin-poin kunci terkait pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas PPKD. Para peserta diajak untuk memahami pentingnya mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam proses pengeluaran kas, serta mengimplementasikan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan potensi kesalahan atau penyelewengan. Pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, serta untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik yang bersumber dari pajak masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab.

Terakhir, materi juga menyoroti pentingnya adopsi teknologi informasi dalam mendukung efisiensi dan transparansi dalam sistem pengeluaran kas PPKD. Para peserta

diberikan pemahaman tentang berbagai sistem dan aplikasi teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses-proses administratif terkait dengan pengeluaran kas, mulai dari pembuatan dokumen transaksi hingga pelaporan keuangan. Penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu PPKD dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan, serta memperkuat tata kelola keuangan secara keseluruhan di level pemerintahan yang lebih tinggi.

Materi terakhir sebelum melanjutkan pada kegiatan verifikasi pengeluaran, tim pengabdian memberikan tutorial dan ceramah terkait laporan pertanggungjawaban BUD (Bendahara Umum Daerah). Materi mengenai laporan pertanggungjawaban BUD menjadi sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peserta diberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur penyusunan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban BUD, yang mencakup informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas serta saldo bank pada akhir periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk memberikan informasi yang jelas dan terpercaya kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas keuangan.

Selain itu, materi juga membahas pentingnya kualitas dan integritas informasi yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban BUD. Para peserta diberikan pemahaman tentang standar pelaporan keuangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun standar-standar internasional seperti standar akuntansi pemerintahan. Penggunaan standar yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban BUD dapat dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta untuk memudahkan perbandingan dan analisis kinerja keuangan daerah dari waktu ke waktu.

Terakhir, dalam pembahasan materi ini, para peserta juga diajak untuk memahami peran pentingnya audit internal dan eksternal dalam memvalidasi informasi yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban BUD. Audit internal dilakukan oleh unit internal pemeriksa keuangan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan, sementara audit eksternal dilakukan oleh pihak independen untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban BUD. Kedua jenis audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban BUD dapat dipercaya dan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Materi terakhir mengenai verifikasi pengeluaran dan latihan yang dilakukan oleh seluruh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan tahapan krusial dalam memperkuat kontrol internal dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Verifikasi pengeluaran bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap transaksi pengeluaran dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Melalui verifikasi yang cermat, potensi kesalahan atau penyelewengan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi keuangan daerah.

Selain verifikasi pengeluaran, latihan yang diberikan kepada seluruh bendahara pengeluaran SKPD juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kapabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Melalui latihan ini, para bendahara diberikan pemahaman mendalam tentang tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar, termasuk prosedur-prosedur verifikasi, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan. Selain itu, latihan juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, sehingga para bendahara pengeluaran dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Dengan demikian, kombinasi antara verifikasi pengeluaran yang teliti dan latihan yang komprehensif bagi seluruh bendahara pengeluaran SKPD merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan dari verifikasi yang baik dan peningkatan kapabilitas melalui latihan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam pengelolaan keuangan di tingkat SKPD, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Pangkep secara keseluruhan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para bendahara pengeluaran sangat bersyukur dengan kehadiran tim pengabdian UNHAS dengan memberikan topik pengabdian seperti yang dilakukan, hal ini disampaikan oleh mitra kami karena kegiatan pengabdian seperti ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan kapabilitas selaku bendahara pengeluaran. Adanya peningkatan kapabilitas dapat diukur dari kemampuan para peserta dalam merumuskan berbagai solusi atas kasus penatausahaan pengeluaran termasuk memecahkan masalah yang mereka hadapi selama ini. Dengan meningkatnya kapabilitas mereka, diharapkan juga para bendahara pengeluaran dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga memberikan kontribusi positif yang lebih besar dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Pangkep.

Selain itu, hasil yang menggembirakan dari kegiatan ini juga tercermin dalam semangat dan antusiasme yang ditunjukkan oleh para bendahara pengeluaran untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas layanan keuangan yang mereka berikan. Mereka menyadari pentingnya pembelajaran kontinu dalam menghadapi dinamika yang terus berubah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya



SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) skema Dies Unhas ini telah terlaksana dengan sangat baik dan memperoleh sambutan luar biasa dari segenap aparat pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pelaksanaan pengabdian dengan tujuan untuk mencapai tertib administrasi dan tertib penatausahaan keuangan daerah menjadi suatu persamaan persepsi pemahaman dan langkah yang terpadu, integral dan menyeluruh dari semua unsur-unsur yang saling terkait dalam upaya pengelolaan keuangan.

Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kapabilitas para bendahara pengeluaran di Kabupaten Pangkep dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil yang telah dicapai, terlihat bahwa para peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan hingga kemampuan dalam merumuskan solusi atas berbagai masalah penatausahaan pengeluaran yang kompleks. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan daerah sangatlah penting untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan profesionalisme, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara holistik. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperkuat jaringan kerja sama yang ada serta mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan publik.

Terakhir, kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini menggarisbawahi pentingnya pembelajaran kontinu dan pengembangan profesionalisme sebagai upaya untuk menghadapi dinamika yang terus berubah dalam pengelolaan keuangan daerah. Para bendahara pengeluaran dan aparatur pemerintah lainnya perlu terus mendorong diri mereka untuk belajar dan berinovasi agar dapat menjawab tantangan yang dihadapi, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi merupakan awal dari komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan keuangan publik demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pangkep.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga seluruh rangkaian proses pengabdian dapat berjalan lancar. Dukungan dari seluruh bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten Pangkajene Kepulauan, tim pengabdian Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tanpa kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi dari semua pihak, pencapaian positif yang kami raih tidak akan terwujud. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Hasanuddin, atas dukungan, bimbingan, dan kesempatan melaksanakan kegiatan ini. Bantuan dan bimbingan yang kami peroleh dari lembaga dan universitas, membantu kelancaran program pengabdian yang kami laksanakan hingga diperoleh hasil yang baik. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, rekomendasi, dan dukungan yang telah diberikan dan kami berharap kolaborasi ini dapat berlanjut untuk kebaikan bersama.

Referensi :

Bawono, Ick Rangga dan Mohammad Novelsyah, 2010, Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD, Penerbit Salemba, Jakarta.

- Mulyana, Budi, 2010, Modul Penatausahaan Pelaksanaan APBD, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya.
- Sabir, Madris, Yunus, M., Fitrianti, R., Bakhtiar, N., & Saudi, N.D.S. (2017). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, Jurnal Panrita Abdi, 1(1), 62-66.